

**SINERGISITAS PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
PENGEMBANGAN WISATA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH DI
KABUPATEN INDRAGAIRI HULU TAHUN 2013-2015**

Oleh : Gagah Adia Handaka

Email : gagahadiahandaka@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R.
Soebrantas Km. 12, 5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

For optimizing the development of Bukit Tigapuluh National Park, the Central Government synergizes with the Regional Government in maintaining, developing and protecting the Bukit Tigapuluh National Park area. It is important for the Central Government to synergize with the Local Government in maintaining the development of Bukit Tigapuluh National Park area to prevent the misuse of the area, from the result of the research, it is known that the synergicity between the two parties is still overlapping, hence the writer tries to see and develop the synergy between the Central Government and Local Government.

The purpose of this study is to optimize the synergy between the Central Government and the Local Government so that supervision in the development of Bukit Tigapuluh National Park can be maintained and reduce the level of criminality inside and outside the region in order to maintain the forest stability covering the phalura and fauna. The type of research used is qualitative research method. The location of this research was conducted at Bukit Tigapuluh National Park (TNBT) of Indragiri Hulu Regency. Data collection techniques are done by completing the information through interviews and doing documentation requesting the necessary data to the agency to be investigated. While the data analysis is done using qualitative analysis method.

Based on the results of the study the authors draw the conclusion that the synergism that occurred in the development of Bukit Tigapuluh National Park is not yet running optimally, especially from the private sector that minimal information about the condition around the area. The security of the area also still requires more strict guarding by the addition of Forest Police personnel, so that events such as illegal logging and poaching of endangered species can be minimized to the safest point of Bukit Tigapuluh National Park area.

Keywords: Synergy, Tourism Development, Government

Pendahuluan

Perubahan globalisasi yang semakin pesat menuntun kita dalam kehidupan kerja yang semakin padat dan sibuk. Globalisasi merupakan lingkungan strategis yang akan mempengaruhi kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Hari libur menjadi salah satu kesempatan untuk melepas lelah selama seharian bekerja, dan tak sedikit yang memilih berwisata ketempat-tempat wisata untuk menghabiskan waktu liburan baik bersama keluarga maupun kerabat. Ditambah lagi akhir-akhir ini semakin banyak acara televisi yang menayangkan acara bertema mengeksplor tempat-tempat wisata untuk memberikan reverensi pilihan dalam menentukan destinasi tujuan berwisata. Setiap daerah pasti memiliki tempat wisatanya masing-masing, akan tetapi disini penulis mengambil fokus pariwisata yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), objek yang diambil oleh penulis bermaksud untuk membahas sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola tempat wisata tersebut.

Taman Nasioanl Bukit Tigapuluh (TNBT) merupakan hutan lindung yang didalamnya terdapat berbagai macam spesies hewan dan tumbuhan yang populasinya mulai terancam punah, sebut saja seperti Harimau Sumatera, Orang Utan, Gajah Sumatera, Bunga Raflesia dan masih banyak lainnya. Selain menjadi hutan lindung, Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) juga menjadi salah satu objek wisata alam dengan tampilan

yang menarik seperti air terjun, wahana *sport* arung jeram, goa pintu tujuh, juga etnik budaya melayu yang sangat kental, tak heran Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Beberapa peraturan mengenai menjaga hutan dan program lainnya untuk melestarikan hutan di Negara Indonesia telah di atur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 6407/Kpts-II/2002 Letak Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebo.

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.

Saat ini fenomena yang terkait pada pengelolaan wisata alam Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan Lahan

Kasus baru-baru ini terjadi ditahun 2016 yang menimpa Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) ialah pembukaan

lahan yang terjadi dikawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), beberapa dugaan lahan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) ini diperjual belikan kepada pihak swasta yang akan membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Permasalahan ini tak terlepas dari pandangan politik sebagaimana ilmu politik yang mempelajari tentang negara tutur Prof. Dr. J. Barents dalam buku yang berjudul “Ilmu Politika”.

Dalam hal ini dijelaskan oleh Kepala Resort yang bertanggung jawab pada kawasan tersebut mengatakan kurangnya tenaga pengawas polisi kehutanan menjadi faktor kurang optimalnya pengawasan pada kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Idealnya polisi kehutanan untuk menjaga suatu kawasan yakni 1 orang untuk 500 hektar jelasnya. Luas Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu menapai 88.607,63 hektar, apabila dibagi 500 hektar untuk 1 orang maka idealnya polisi kehutanan yang berjaga dikawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah lebih kurang 177 orang.

2. Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Illegal logging merupakan pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan secara berlebihan dan bertentangan terhadap hukum yang berlaku sehingga berpotensi merusak hutan dan ekosistem. Masalah seperti ini juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) mengingat sedikitnya

polisi kehutanan yang bertugas menjadikan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) menjadi sasaran kegiatan *illegal logging* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kebanyakan pohon yang ditebang berjenis kayu Resak yang diambil kulit kayunya (Raru), selama lima tahun terakhir tercatat hanya kasus *illegal logging* yang terjadi di daerah tersebut.

Atas dasar tersebut maka penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Sinergisitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Dalam Pengembangan Wisata Bukit Tigapuluh di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2015”**.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang terlihat dalam penelitian ini adalah ketidak seimbangannya sinergisitas dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), sehingga rumusan masalah yang diapaparkan ialah bagaimana peran sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelaraskan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Kabupaten Indragiri Hulu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola tempat pariwisata, dan melihat sinergisitas antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata, sehingga penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan masukan mengenai bidang pariwisata yang sedang diteliti

Tinjauan Pustaka

Studi Terdahulu

Salah satu studi terdahulu yaitu jurnal Muhammad Fahdio Rachman dengan judul “ *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Kerjasama Pariwisata Dengan Turki Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*”. Strategi kerjasama yang dilakukan disini bertujuan untuk memasarkan atau mempromosikan pariwisata dan budaya-budaya yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan karena terbilang efektif guna meningkatkan devisa yang diterima oleh Negara Republik Indonesia itu sendiri dari tahun 2004 – 2014. Turki menjadi Negara tujuan menjalin hubungan baik dalam kerjasama dikarenakan Indonesia memang telah lama menjalin hubungan yang didasari kemiripan dari kedua belah pihak, baik dari sistem negaranya hingga kondisi sosial masyarakatnya.

Selanjutnya skripsi dari Ildha N. Maiwa dengan judul “*Pengelolaan Destinasi Wisata Oleh Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2014-2015 (Studi Objek Wisata Danau Singkarak)*” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengelolaan wisata Danau Singkarak oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah mencoba untuk memperbaiki baik dari sistem pengelolaan dan pengembangannya agar wisata Danau Singkarak menjadi destinasi unggulan untuk pariwisata

Kabupaten Solok, sehingga fokus utama dalam penelitian ini bagaimana melakukan pengelolaan dalam pengembangan wisata Danau Singkarak agar semakin baik dan menjadi destinasi utama dan meningkatkan Pendapatan daerah di Kabupaten Solok.

Sinergisitas

Sinergisitas adalah bentuk kerjasama dalam mencapai suatu target yang bersifat lebih baik. Silower (1998) dalam buku “*Synergy Trap*” mengemukakan dasar-dasar sinergi yang terdiri dari visi strategi, strategi budaya, kekuasaan dan budaya, integrasi sistem dan investasi awal untuk memperoleh imbalan, keempat komponen itu mewakili unsur-unsur utama dari suatu strategi kerjasama atau kemitraan yang harus berada pada posisinya. Dalam hal ini, komponen sinergi yang dimaksud dikelompokkan menjadi antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengertian sinergisitas dapat diketahui orientasi konsep bersinergi diantaranya adalah, berorientasi pada hasil positif, saling berkerjasama, bertujuan yang sama, dan saling berkaitan antara pihak satu dengan yang lainnya dalam menggapai keberhasilan bersama.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Saat ini hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebut dengan *medebewind*. Dalam istilah belanda yang mencerminkan kerjasama dan konsultasi ini, *medebewind* menunjukkan pada program-program yang pemerintah pusat bertanggung jawab atas

penetapan kebijaksanaan secara umum dan dalam hal pembiayaan. Sedangkan mengenai fungsi-fungsi lainnya, seperti penjabarannya ke dalam proyek-proyek yang spesifik, pelaksanaan serta pemantauannya, menjadi tanggung jawab badan-badan pemerintah daerah. Inisiatif dan aktivitas daerah dibatasi pada dan untuk melaksanakan prioritas-prioritas, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program-program yang ditetapkan secara nasional.

Oleh karena itu, kemampuan yang tepat dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah kecakapan teknis yang berorientasi pada program-program sectoral. Bagaimanapun juga, pemahaman bahwa hal ini merupakan kenyataan yang ada dari pemerintah daerah saat ini adalah penting sebagai satu langkah pertama yang perlu dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah. Tak lepas juga dari hubungan antar pemerintah yang juga menunjang *relationship* lebih baik untuk pembangunan, Raymond J. Burby menyatakan bahwa “Hubungan pemimpin-pengikut praktis terdapat dimana saja dan dalam apa saja kita lakukan”, pada kesempatan lain dikatakan pula bahwa “hubungan pemimpin-pengikut adalah hal yang wajar bagi manusia seperti wajarnya mereka bernafas”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Kualitatif. Jenis penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu, lokasi tersebut dipilih dengan alasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) terbagi atas empat kabupaten dan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki persentase terbesar dalam letak Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) tersebut.

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam tahun 2013 – 2015 yang berhubungan dengan perkembangan dalam pengelolaan tempat wisata di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat mempengaruhi jumlah pengunjung, pengelolaan tersebut dapat dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah hubungan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, titik fokus bagaimana sinergisitas ini dapat terjalin dengan baik dan mengoptimalkan dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu sendiri. Sinergisitas disini menjadi jembatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencari solusi untuk menangani masalah yang ada di dalam maupun luar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara, contoh data primer yang penulis peroleh yakni berapa persen pemerintah daerah bersinergi terhadap pemerintah pusat dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang obyek yang sedang diteliti, seperti dari surat kabar, dan internet, adapun contoh dari data sekunder dalam penelitian ini adalah Jumlah Pengunjung TNBT, Jumlah personil polisi kehutanan, kasus yang terjadi di TNBT, pencapaian Renstra TNBT, alokasi belanja 2011 - 2015 TNBT.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, karena untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diperlukan data-data yang menunjang, tanpa teknik pengumpulan data maka kemungkinan data yang diperoleh tidak relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dalam suatu penelitian, karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*Interiew*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden. Menurut Sudjana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya

Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, dengan dan menjelaskan secara deskriptif tentang hasil yang diperoleh oleh penulis dan disampaikan kembali melalui lisan maupun tulisan, serta keadaan sekitar yang diamati dalam perkembangan objek yang diteliti.

Hasil Penelitian

1. Peran Pemerintah Pusat

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara resmi dibentuk pada tahun 1995 melalui SK. Menteri Kehutanan yang merupakan penggabungan kawasan Hutan Lindung (HL) di wilayah Provinsi Riau dan Jambi serta alih fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi sTerbatas (HPT) di wilayah Riau (SK Menhut Nomor

539/Kpts-II/1995). Pengembangan potensi ekowisata di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah sejak tahun 2002. Pengembangan ekowisata ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan 2 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Ekowisata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

2. Peran Pemerintah Provinsi

Pada tingkat provinsi Riau tidak ditemukan adanya kebijakan yang secara langsung terkait dengan pengelolaan ekowisata di TNBT. Sedangkan pada tingkat kabupaten, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan bahwa salah satu kebijakan pokok Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengembangkan kepariwisataan yang berbasis pertanian (agrowisata). Sedangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Nomor 240 tahun 2006 Tentang RPJM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2006 – 2010, kebijakan pembangunan sektor pariwisata tidak disebutkan secara eksplisit.

3. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Indragiri Hulu melihat Status Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sebagai tanggung jawab bersama untuk Indonesia, meskipun dengan kehadiran Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang tidak dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah secara langsung dikarenakan kawasan tersebut dibawah naungan Kementrian Republik Indonesia sehingga dana keluar dan dana masuk langsung menuju pusat, hal ini bertolak belakang dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata. Akan tetapi disinilah Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab untuk membantu penjagaan dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah dalam perkembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

4. Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Pemerintah Daerah tidak dapat banyak memberikan kontribusi terhadap kawasan tersebut khususnya didalam kawasan. Hal ini tentu bukan tidak ada alasan, Taman Nasional Bukit Tigapuluh berada dibawah naungan Kementrian Republik Indonesia dimana pengelolaan diberikan langsung kepada pusat, pemerintah daerah bersinergi hanya melalui luar kawasan seperti membantu

perbaikan jalan menuju ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh, memberikan dukungan pada saat ada kegiatan berupa penyuluhan kepada masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh baik data dokumentasi maupun data wawancara yang dikumpulkan, dapat disimpulkan sinergisitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengembangkan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

- a. Sinergisitas yang terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat setempat, dan pihak swasta dinilai belum dilaksanakan secara optimal, masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sehingga melemahnya pengawasan yang mengakibatkan banyaknya gangguan terhadap kawasan yang mengancam kelangsungan hidup satwa dan kualitas alamnya. Beberapa faktor yang memicu lemahnya sinergisitas dalam penangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) ini disebabkan oleh luas daerah yang memiliki sedikit Polisi Kehutanan sehingga pengawasan tidak optimal, hukum yang mengatur tentang Taman Nasional Bukit Tigapuluhpun tidak memiliki ketegasan, hal ini memicu sering

terjadinya jual beli lahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan.

- b. Pihak swasta yang membuka lahan perkebunan di dekat daerah bahkan berdampingan langsung bersama area Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) masih memiliki sifat tidak peduli terhadap kondisi alam dan satwa yang berada pada kawasan tersebut, sehingga masih banyak terjadi masalah pada kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) seperti pembukaan lahan, penebangan liar (*Illegal logging*), sampai perburuan dan pembunuhan satwa.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sinergisitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Kabupaten Indragiri Hulu, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) mulai dari tingkat keamanan dengan menambah personil Polisi Kehutanan dan lebih bersinergi bersama masyarakat setempat, dengan penguatan keamanan serta dibantu dengan peran masyarakatnya tentu kondisi kawasan akan lebih terjaga baik dari gangguan luar ataupun gangguan dari dalam yang akan

keluar seperti binatang yang masuk ke pemukiman atau kebun warga.

- b. Perbaikan infrastruktur jalan, pelebaran dan perataan tanah guna untuk menunjang kebutuhan wisatawan atau peneliti yang akan berkunjung, dengan demikian semakin banyaknya orang yang tau mengenai informasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) baik dari kondisi dan fungsinya, diharapkan dapat menyadarkan peran Taman Nasional bagi negara, dan juga dengan mudahnya akses kedalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Pemerintah Daerah dapat melihat kondisi dan memberikan rekomendasi agar sinergisitas dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amal, Ichlasul, 1993, *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haris, Syamsuddin, 2003, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI press.
- Riwu Kaho, Josef, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Center for

Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.

- Sugandha, Dann, 1981, *Masalah Otonomi dan Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bandung: C.V. Sinar Baru.
- Suyanto, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pamudji, S, 1993, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Najiyati, Sri dan S.R. TopoSusilo, 2011, *Sinergisitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Papasi J.M, 2010, *Ilmu Politik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amal, Ichlasul, 1993, *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nogi, Hessel, 2003, *Kebijakan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta.
- Obsatar, Sinaga, 2010, *Implementasi Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri*

*Republik Indonesia, Jurnal
Administrasi, Nomor 3 Volume 3.*

Skripsi:

Ildha N. Maiwa. 2016. *Pengelolaan
Destinasi Wisata Oleh Pemerintah
Kabupaten Solok Tahun 2014-2015 (Studi
Objek Wisata Danau Singkarak)*. Jurusan
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Jurnal:

Muhammad Fahdio Rachman. 2014.
*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam
Kerjasama Pariwisata Dengan Turki Era
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*.
Auradian Marta. 2016. *Strategi
Pemerintah dalam Pengembangan
Ekowisata (Studi di Kawasan Taman
Nasional Bukit Tigapuluh Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau)*.

Sumber Lainnya:

<http://m.metrotvnews.com/read/2014/06/18/254377/jumlah-polisi-hutan-jauh-dari-ideal>.

[www.Academia.edu/26915689/dinas_pen
dapatan_daerah_kabupaten_indragiri_hul
u](http://www.Academia.edu/26915689/dinas_pen
dapatan_daerah_kabupaten_indragiri_hul
u).